



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI
SISTEM PERINGATAN DINI OLEH TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL NASIONAL**

ASROR MUKTI ADI

NIM: 120170303006

**Tesis Yang Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Megister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

**BOGOR
FEBRUARI 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Asror Mukti Adi
NIM : 120170303006
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : **Evaluasi Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional**

Tesis dengan judul atas nama mahasiswa tersebut di atas telah disetujui untuk dapat diujikan, sebagai bagian dari persyaratan penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister bidang Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I : Laksma TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum

(.....)

Pembimbing II : Kolonel Sus. Dr. Bayu Setiawan, S.H.,M.Si.

(.....)

Bogor, Februari 2019

Dekan Fakultas Keamanan Nasional

Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT.
Laksamana Muda TNI

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Asror Mukti Adi
NIM : 120170303006
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. (.....)

Pembimbing II : Dr. Bayu Setiawan, S.H.,M.Si. (.....)

Penguji I : Dr. I Gede Sumertha KY, PSC, M.Sc. (.....)

Penguji II : Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M (.....)

Penguji III : Dr. Eri R. Hidayat, MBA, MHMRC (.....)

Ditetapkan di : Sentul, Bogor

Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

Asror Mukti Adi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Asror Mukti Adi
NIM : 120170303006
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Evaluasi Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional.”

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

Asror Mukti Adi

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Pencegahan Konflik Melalui Sistem Peringatan Dini oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.A.P selaku Rektor Universitas Pertahanan,
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T.,M.MT selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional, Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional sekaligus sebagai pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini,
3. Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si, M.M. Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik Cohort-6 yang telah memotivasi, memberikan petunjuk dan arahan pada penelitian ini dengan penuh kesabaran,
4. Kolonel Sus. Dr. Bayu Setiawan, S.H.,M.Si. dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini,

5. Para penguji tesis diantaranya Dr. I Gede Sumertha KY, PSC, M.Sc., Dr. Surryanto D.W, M.H., M.M, Dr. Eri R. Hidayat, MBA, MHMRC, yang telah banyak memberi masukan dan arahan terhadap tesis ini,
6. Prof. Salim Said, Dr. I Gede Sumertha KY, PSC, M.Sc., Dr. Ichsan Malik, M.Si., Dr. Arif Budiarto, DESS, Dr. M. Natsri, L.LM, Dr. Eri R Hidayat, MBA, MHMRC, Romo Setyo Wibowo, Romo Magnis Suseno, Dr. Puguh Santoso, ST, M.Sc., beserta segenap dosen prodi Damai dan Resolusi Konflik yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan ilmu kepada peneliti dan rekan-rekan peneliti semasa perkuliahan. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Ningsih Susilawati, S.Sos., M.Si. (Han), Mbak Sri Wahyuni, S.S., M.Si (Han) staff Prodi DRK yang sangat membantu urusan administratif selama perkuliahan,
7. Keluarga terkasih: terutama Istriku yang sangat kucintai Kusumaning Rahardian Putri, buah hatiku: Arya Kusuma Abiyyu Wicaksana dan Aaron Attarizky Zulkarnaen Wicaksana, Ayahanda Alm. Drs. H. Adam Darmono, Ibunda Hj. Istianah, Papah H. Eddy Raharto, Mamah Hj. Bunga Tang, kakak-kakakku, Pakdhe Didik, Pakdhe Iwan., Om Rosid, Om Miftah, Om Iis, serta adik-adikku Om Ga, Om Tok, Onty Pipin, Onty Wawa dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat yang sangat berarti bagi penulis sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini,
8. Marsma TNI Dony Rizal P.A Lubis Karoum Unhan, dan Kolonel Inf Budi Setiawan yang sangat atas dukungan fasilitas yang penulis rasakan sangat membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
9. Bapak Leli Salman Al Farisi, M.Si. KaSubdit Penanganan Konflik Direktorat Kewaspadaan Nasional di Kementerian Dalam Negeri, Teuku Riefky Harsya KaSubdit. Daerah Pasca Konflik Wilayah IV Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Dirjen PDT Kementerian Desa PDPT, Kol. Inf. Jusmarizal Kabid. Penanganan

Konflik dan Kontijensi Konflik Keasdepan Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kemenko Polhukam, Bapak Noegroho Adi dan Bapak Mafud Salatunlayl Deputy Konflik Sosial, Kemenko PMK, Bapak Bambang Supriyambodo, S.H. Kasubdit Sosial, Ketertiban dan Ketentraman Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Dit. V Jamintel Kejaksaan Agung RI, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, dan membantu dalam memperoleh data penyusunan tesis ini,

10. Rekan-rekan Prodi DRK Cohort 6 yang selalu kompak seperti saudara dan rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Unhan Cohort 9, atas kehangatan persahabatan dan kerjasama yang baik selama masa pendidikan Universitas Pertahanan,
11. Rekan-rekan satu kelompok tugas DRK (Dugong), Letkol. Caj. Ridwan, Suci Utami, Jovita Pontoh, Permata Andanti, Ibnu Saputra, atas kerjasama yang baik dan support dalam menyelesaikan penugasan-penugasan akademik selama masa perkuliahan,
12. Rekan-rekan grup diskusi malam jumat Hole-hole, Letkol. Kav. Yusuf Chandra, Wafi, Zensa, Galang, Eman, Irul, Alfian, Mei, Akbar, Eca, untuk sharing dan kebersamaan setiap malam jumat di basecamp,
13. Rekan-rekan kamar 101-102 atas kebersamaan selama masa-masa penyusunan tesis, Abdi, Pak Ilham Gultom, Pak Inaldi Luther, Muda, Hanung, Finda, Aldo, Wafi, Sutiono, Made dan rekan-rekan lainnya.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah di Unhan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan seluruh pihak atas dukungan dan bantuannya. Peneliti menyadari bahwa tesis telah tersusun ini masih kurang sempurna, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis yang sudah penulis susun ini dapat turut memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat pula bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini.

Bogor, Februari 2019

Asror Mukti Adi

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI OLEH TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL NASIONAL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL NASIONAL

Asror Mukti Adi

Pada era globalisasi dan berkembangnya demokratisasi di dunia tidak terkecuali di Indonesia telah membawa perubahan paradigma ancaman terhadap keamanan nasional. Pasca reformasi 1998 Indonesia mengalami masa transisi demokratisasi dimana eksisnya yang muncul adalah kebebasan dan masuknya berbagai ancaman berupa radikalisme, terorisme, separatisme, yang menyusup berkelindan diantara masalah struktural dan sosial di Indonesia berupa kemiskinan dan ketimpangan pasca krisis moneter. Dalam menangani tingginya ancaman terhadap eksistensi negara yang salah satunya terutama diakibatkan adanya konflik internal negara berupa konflik sosial, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang mengatur pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Dalam penanganan konflik pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yang bertindak sebagai *leading sektor* adalah Kemenko Polhukam yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pencegahan konflik khususnya pada upaya pembangunan sistem peringatan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan proses analisis permasalahan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik, Tinjauan Konsep Keamanan Nasional dan *Conflict Early Warning and Early Respond (CeWeRs)*. Parameter evaluasi kebijakan yang digunakan terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan dari William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pembangunan sistem peringatan dini oleh Tim Terpadu Nasional belum berjalan dengan baik sebagaimana terungkap dari parameter evaluasi tersebut. Faktor pendukung diantaranya anggaran, program, kelembagaan, *political will*. Sedangkan yang menjadi faktor tantangan diantaranya belum adanya kesamaan pemahaman, belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi program, masalah lingkup kewenangan, serta ego sektoral.

Kata kunci : Penanganan Konflik Sosial, Kebijakan, Keamanan Nasional, Sistem Peringatan Dini, CeWeRs

ABSTRACT

EVALUATION OF THE CONFLICT PREVENTION POLICY THROUGH THE EARLY WARNING SYSTEM BY AN INTEGRATED TEAM FOR NATIONAL SOCIAL CONFLICT MANAGEMENT IN THE HANDLING OF NATIONAL SOCIAL CONFLICT

Asror Mukti Adi

In the era of globalization and democratization development in the world, Indonesia, no exception, has brought a shifting paradigm to threats against national security. Post-1998 reformation, Indonesia experienced a period of democratic transition where the excesses that emerged were freedom and the inclusion of various threats in the form of radicalism, terrorism, separatism, which infiltrated across structural and social problems in Indonesia in the form of poverty and inequality after the monetary crisis. In dealing with the heightened threat against state's existency, national domestic conflict in form of social conflict, Indonesia regulates post-conflict prevention, cessation and recovery by establishing Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management. In handling conflicts from 2012 to 2015, Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs (Indonesia) acted as the leading sector, changed to the Ministry of Home Affairs based on Government Regulation Number 2 of 2015. This study aims to evaluate how policies of conflict prevention, especially in the effort to build an early warning system. This research uses qualitative research method and the problem analysis process uses the theory of Public Policy Evaluation, Review of National Security Concepts and Conflict Early Warning and Early Responds (CeWeRs). The policy evaluation parameters consisted of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy of William N. Dunn. The results of this study found that in the construction of an early warning system by a national integrated team is not gone well as revealed by the evaluation parameters. Supporting factors including budget, program, departments, political will. Whereas the challenge factors including the lack of common understanding, poor coordination, program synchronization, scope of authority, sectoral ego.

Keywords: Social Conflict Management, Policy, National Security, Early Warning System

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	9
1.2.1 Fokus Penelitian	9
1.2.2 Sub Fokus Penelitian	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB 2 KAJIAN TEORETIK.....	12
2.1 Deskripsi Konseptual	12
2.1.1 Kebijakan Publik	12
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	13
2.2 Implementasi Kebijakan	16
2.3 Evaluasi Kebijakan	21

2.4	Kebijakan yang Dievaluasi	23
2.4.1	Fungsi Evaluasi	26
2.4.2	Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan.....	27
2.5	<i>National Security</i> atau Keamanan Nasional	29
2.5.1	<i>Human Security</i> atau Keamanan Manusia	33
2.6	Konsep CeWers (<i>Conflict Early Warning and Early Respond System</i>).....	36
2.7	Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	43
2.8	Kerangka Pemikiran	48
BAB 3 METODE PENELITIAN		49
3.1	Metode Penelitian.....	49
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.2.1	Tempat Penelitian	49
3.2.2	Waktu Penelitian.....	48
3.3	Obyek Penelitian	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data	52
3.4.1	Dokumentasi	52
3.4.2	Wawancara	53
3.4.3	Observasi	53
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	53
3.6	Teknik Analisis Data.....	54
3.7	Jadwal Penelitian	56
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		57
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	57
4.1.1	Sejarah Pembentukan Tim Terpadu PKS.....	59
4.1.2	Tugas dan Kewenangan Tim Terpadu PKS	59
4.1.3	Gambaran Umum Tim Terpadu PKS	60
4.2	Hasil Penelitian Pelaksanaan Fungsi Tim Terpadu PKS Dalam Membangun Sistem Peringatan Dini.....	66
4.2.1	Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik	67

4.2.2	Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;	83
4.2.3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.....	85
4.2.4	Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial.....	89
4.2.5	Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	97
4.3	Pembahasan	100
4.3.1	Evaluasi pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu PKS Nasional.....	100
4.3.1.1	Efektifitas	102
4.3.1.2	Efisiensi.....	109
4.3.1.3	Kecukupan	113
4.3.1.4	Perataan	115
4.3.1.5	Responsivitas.....	116
4.3.1.6	Ketepatan.....	118
4.3.2	Korelasi <i>National Security</i> atau Keamanan Nasional, dan Penanganan Konflik Sosial.....	119
4.3.3	Korelasi Keamanan Manusia dan <i>CeWeRS (Conflict Early Warning and Early Response System)</i>	125
4.4	Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini.....	132
4.4.1	Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini	132
4.4.2	Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini	132
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		135
5.1	Kesimpulan	135
5.2	Rekomendasi	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Sumber Konflik	7
Gambar 1.2	Perbandingan Data Peristiwa Konflik Sosial Periode 2013-2017	7
Gambar 2.1	Kedekatan prosedur analisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan kebijakan	14
Gambar 2.2	Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi	17
Gambar 2.3	Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik	41
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran	48
Gambar 3.1	<i>Components of Data Analysis: Interactive Model</i>	55
Gambar 4.1	Struktur Tim Terpadu PKS di Pusat dan Daerah	60
Gambar 4.2	Struktur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2018 .	63
Gambar 4.3	Peristiwa konflik Sosial dari Tahun 2014-2017	69
Gambar 4.4	Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial, SIPKS	71
Gambar 4.5	Sistem Informasi SNPK	73
Gambar 4.6	Peta Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal.....	74
Gambar 4.7	Indeks Kerukunan Umat Beragama 2017	75
Gambar 4.8	Data Indeks Kerawanan Pilkada	76
Gambar 4.9	Data Indeks Kerawanan Pilkada 2018	77
Gambar 4.10	Sistem informasi Indeks Ketahanan Nasional	78
Gambar 4.11	Sistem Informasi Kejaksan Jaganeneri	79
Gambar 4.12	Sistem Informasi Kementerian Sosial	80
Gambar 4.13	Deskripsi Lingkup Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ...	81
Gambar 4.14	Deskripsi model kebijakan <i>one map policy</i> dalam pengendalian program.....	82
Gambar 4.15	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan membentuk PPWK	85

Gambar 4.16	Data Penguatan Kapasitas Kemampuan Intelijen Bagi Aparat Pusat dan Daerah	87
Gambar 4.17	Data Rekapitulasi Pembentukan FKDM	90
Gambar 4.18	Peta Pembentukan FPK Seluruh Indonesia 2017.....	93
Gambar 4.19	Gambaran silangan operasional kebijakan Pengaturan Keamanan Nasional	120
Gambar 4.20	Kerangka dinamis pencegahan konflik.....	125
Gambar 4.21	Struktur Organisasi CeWeRs.....	127
Gambar 4. 21	<i>Early Warning And Response Systems Design For Social Conflicts</i>	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dimensi keamanan dalam Pandangan Tradisional dan Non Tradisional	30
Tabel 2.2	Matriks Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1	Narasumber Penelitian	50
Tabel 3.2	Waktu Penelitian.....	56
Tabel 4.1	Kategorisasi Sumber Konflik	82
Tabel 4.2	Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen bagi Aparat Pusat dan Daerah	86
Tabel 4.3.	Data kelompok masyarakat yang dilakukan pemberdayaan (Peningkatan dan Pemanfaatan Kapasitas Sosial)	87
Tabel 4.4	Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Indonesia Tahun 2017.....	91
Tabel 4.5	Tabel Data Rekapitulasi Pembentukan FPK Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se-Indonesia Tahun 2017	93
Tabel 4.5	Jumlah FKUB.....	94
Tabel 4.7	Data Jumlah Fasilitas Dialog FKUB, dan Fasilitas Harmonisasi KUB	95
Tabel 4.8	Upaya Penguatan Pranata Adat dan Modal Sosial.....	95
Tabel 4.9	Data Rekapitulasi Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Prov/ Kab/ Kota Sumber Dirjen Polpum Desember 2016	98
Tabel 4.10.	Lembaga dengan fungsi Intelejen di daerah, desa/ kecamatan	100
Tabel 4.11	Data Sinkronisasi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK dalam Peyusunan Rencana Aksi Kebijakan PKS ..	106
Tabel. 4.12	Perbandingan CeWeRs	130

DAFTAR SINGKATAN

Babinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Babinsa	: Bintara Pembina Desa
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CeWeRs	: <i>Conflict Early Warning and Early Response System</i>
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Forkominda	: Forum Komunikasi Intelijen Daerah
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi Masyarakat
FKPT	: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FPK	: Forum Pembauran Kebangsaan
Inpres	: Instruksi Presiden
Kamnas	: Keamanan Nasional
Kemenko	: Kementerian Koordinator
Kominda	: Komunitas Intelijen Daerah
K/L	: Kementerian dan Lembaga
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PGKDN	: Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
PKBN	: Pembinaan Kesadaran Bela Negara
PKS	: Penanganan Konflik Sosial
PPWK	: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN	: Rencana Aksi Nasional Timdu
Renaksi	: Rencana Aksi
SiPKS	: Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial

SNPK : Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan
UU : Undang-Undang
UNDP : *United Nation Development Program*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian, Wawancara dan Permintaan Data
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 : Kegiatan Observasi Penelitian
- Lampiran 4 : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.5 – 326 Tahun 2018 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Tahun 2018
- Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian